

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan rekomendasi efektivitas mekanisme dan prosedur Pembangunan Wilayah Terpadu sebagai penghubung rencana tata ruang dan rencana pembangunan Kota Surakarta, serta rekomendasi bagi studi lebih lanjut.

5.1. Kesimpulan

Pembangunan Wilayah Terpadu telah berupaya menghubungkan rencana tata ruang dan rencana pembangunan dengan memperhatikan adanya program spasial yang dilaksanakan dalam rencana pembangunan dengan berpedoman pada rencana tata ruang sebagai matra spasial. Fungsi kawasan, aspek prioritas kawasan, serta isu dan permasalahan kawasan menjadi landasan dalam menentukan program kewilayahan yang akan dilaksanakan pada kawasan PWT. Sebaran alokasi program dan anggaran dapat dimonitoring, sehingga pelaksanaan program-program kewilayahan tersebut menjadi lebih mudah untuk dikontrol. Pembangunan Wilayah Terpadu dapat menjadi alat bagi kepala daerah dalam memonitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di daerah. Program kewilayahan dalam PWT menjadi acuan bagi SKPD sesuai dengan tupoksinya untuk menyusun Renstra SKPD yang dijabarkan pada program dan kegiatan tahunan dalam periode lima tahunan.

Berdasarkan analisis mekanisme dan prosedur PWT yang telah dilakukan terdapat beberapa tahapan yang dilakukan evaluasi antara lain penentuan kawasan PWT yang hanya berupa kawasan strategis dapat menyebabkan program-program pembangunan yang ada tidak dapat tercakup secara keseluruhan sehingga menciptakan ketidakterpaduan terhadap program-program pada daerah di luar kawasan dalam wilayah yang dijadikan PWT; Adanya mekanisme pemilihan terhadap kawasan yang dijadikan PWT menyebabkan Pembangunan Wilayah Terpadu tidak mencakup keseluruhan wilayah sehingga dapat menciptakan gap antar kawasan dalam satu wilayah yang dijadikan PWT; Adanya mekanisme prioritas kawasan PWT menciptakan stigma pengembangan kawasan yang hanya dilakukan pada kawasan yang diprioritaskan, untuk menciptakan keterpaduan pembangunan harus dilakukan secara merata sesuai dengan kebutuhan pengembangan masing-masing kawasan.

Berdasarkan analisis tersebut terdapat mekanisme dan prosedur yang masih belum efektif dalam menjembatani rencana pembangunan dan rencana tata ruang melalui program kewilayahannya. Terutama sebagai guide atau pengarah dalam usaha untuk mencapai tujuan PWT dalam untuk

menciptakan keserasian, pemerataan, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan. Sehingga membutuhkan perubahan/revisi terhadap mekanisme dan prosedur sesuai dengan alternatif yang diberikan sebelumnya. Upaya mengintegrasikan antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan perlu dilakukan. Kebijakan Pembangunan Wilayah Terpadu perlu dilanjutkan dengan syarat dilakukan perubahan/revisi tersebut. Dengan adanya PWT tersebut dapat menciptakan keterpaduan antar program untuk menciptakan keserasian, pemerataan, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diberikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait efektivitas mekanisme dan prosedur Pembangunan Wilayah Terpadu sebagai penghubung rencana tata ruang dan rencana pembangunan, antara lain:

5.5.1. Rekomendasi bagi Pemerintah

Rekomendasi yang diberikan bagi Pemerintah Pusat maupun Kementrian/Lembaga Negara antara lain:

1. Upaya untuk mengintegrasikan atau menjembatani antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan harus terus diupayakan melalui instrumen.
2. Instrumen Pembangunan Wilayah Terpadu harus dilanjutkan dengan melakukan beberapa perubahan/revisi terhadap instrumen didalamnya.
3. Upaya mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik lintas kementrian dan lembaga serta antar SKPD
4. Dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu dijadikan sebagai dokumen pendamping dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.
5. Penyusunan Dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu membutuhkan anggota penyusun dari tiap SKPD yang dapat memahami tujuan dan lingkup PWT agar menghasilkan program kewilayahan yang sesuai dengan fungsi kawasan, aspek prioritas kawasan, potensi serta isu dan permasalahan kawasan.
6. Program-program spasial yang diajukan oleh tiap SKPD harus memiliki lokus pelaksanaan program, sehingga memudahkan kontrol pelaksanaan program kewilayahan yang disusun dalam PWT.
7. Kegiatan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian dan evaluasi Pembangunan Wilayah Terpadu dijadikan sebagai bagian dari agenda SKPD.

5.5.2. Rekomendasi bagi Studi Lanjutan

Rekomendasi yang diberikan bagi dilaksanakannya studi lanjutan antara lain:

1. Upaya menciptakan alternatif perencanaan strategi keruangan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Indonesia.
2. Upaya pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan kontrol/pengawasan dalam pelaksanaan program-program kewilayahan.
3. Upaya mengkategorikan program spasial dan aspasial dalam rencana pembangunan di Indonesia.
4. Upaya menciptakan integrasi antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan melalui instrumen.

Berdasarkan rekomendasi yang telah diuraikan di atas, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya mengintegrasikan atau menjembatani rencana tata ruang dan rencana pembangunan di Indonesia bagi pemerintah pusat beserta kementrian dan lembaga, pemerintah daerah beserta SKPD di dalamnya, serta bagi pertimbangan untuk studi lanjutan.